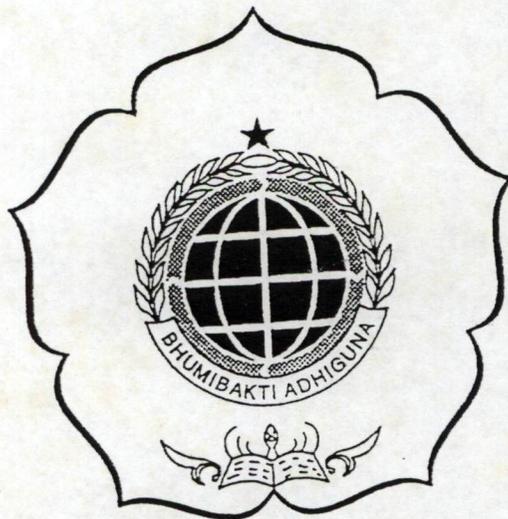


**PRODUKTIVITAS PETUGAS UKUR
DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian Diploma IV
Jurusan Perpetaan**



Oleh :

ARIF BASUKI

NIM : 9761178

INTISARI

Badan Pertanahan Nasional dalam mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan memerlukan dukungan sumber daya manusia yang berkualitas, tenaga ahli yang cakap, terampil, profesional, disiplin dan berdedikasi tinggi serta akhlak yang tidak tercela. Salah satu kegiatan dalam mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan adalah pengukuran dan pendaftaran tanah. Sehingga petugas ukur sebagai aparat pelaksana dalam pendaftaran tanah ini harus memenuhi kriteria diatas.

Tujuan dari penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui tingkat produktivitas petugas ukur di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, 2) Untuk mengetahui latar belakang pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja petugas ukur dalam menunjang produktivitas petugas ukur, 3) Untuk mengetahui latar belakang yang paling menunjang produktivitas petugas ukur.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Populasi penelitian adalah semua petugas ukur yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur dan gambar ukur yang dihasilkan selama lima tahun terakhir (1996 - 2000). Untuk menentukan kualitas sampel diambil sebanyak 10 % dari gambar ukur yang dihasilkan pada tahun 2000. Sedangkan analisa yang digunakan teknik analisa deskriptif. Untuk penyajian data digunakan tabulasi. Data mengenai tingkat pendidikan, pelatihan, pengalaman dan produktivitas disusun dalam tabel frekuensi yang kemudian dianalisa dengan tabulasi silang. Untuk memperkuat kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisa tabulasi silang dianalisa dengan analisa regresi berganda.

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Tingkat produktivitas petugas ukur di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur cukup produktif. Selama lima tahun terakhir (1996 - 2000) indeks produktivitas turun sebesar - 1 %. 2) Secara kuantitas, besarnya produktivitas petugas ukur di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur ditunjang oleh tingkat pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja sebesar 45,8 %. Sedangkan secara kualitas dari 753 gambar ukur yang dijadikan sampel, sebanyak 745 atau 96,68 % gambar ukur sudah dapat memberikan jaminan kepastian batas, letak dan luas. 3) Secara kuantitas, pelatihan sangat menunjang terhadap besarnya produktivitas petugas ukur di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, sedangkan secara kualitas sangat ditunjang oleh tingkat pendidikan yang tinggi.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
INTISARI	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Pembatasan Masalah	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Tinjauan Pustaka	7
B. Kerangka Pemikiran	11
C. Anggapan Dasar.....	14
D. Batasan Operasional.....	14
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode yang digunakan	16
B. Lokasi Penelitian	17
C. Populasi dan Sampel	17
D. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data	18

	E. Teknik Analisa Data	20
BAB IV	GAMBARAN UMUM KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUWANGI	
	A. Struktur Organisasi	26
	B. Kepegawaian	28
	C. Sarana dan Prasarana	29
	D. Hasil Pengukuran dan Pendaftaran Tanah.....	31
BAB V	PENYAJIAN DATA DAN ANALISA DATA	
	A. Latar Belakang Petugas Ukur	35
	B. Produktivitas Petugas Ukur	36
	C. Kegiatan Pengukuran.....	37
	D. Proses Kegiatan Pengukuran	40
	E. Hasil Kegiatan Pengukuran	42
	F. Analisa Tabulasi Silang.....	43
	G. Analisa Regresi Berganda.....	64
BAB VI	KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan	72
	B. Saran	73
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pembangunan jangka panjang kedua disebutkan bahwa pembangunan aparatur negara diarahkan untuk meningkatkan kualitas aparatur negara agar aparat negara lebih memiliki sikap dan perilaku yang berintikan pengabdian, kejujuran, tanggungjawab, disiplin, keadilan dan berwibawa sehingga dapat memberikan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan hati nurani rakyat.

Dalam rangka memberi pelayanan kepada masyarakat di bidang pertanahan maka dibentuk Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan baik berdasarkan Undang Undang Pokok Agraria maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang meliputi pengaturan penggunaan tanah, penguasaan dan pemilikan tanah, pengurusan hak-hak atas tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah pertanahan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Presiden.

Mengingat bahwa kebutuhan manusia akan tanah terus meningkat sedang luas tanah yang tersedia bersifat tetap, maka nilai ekonomis tanah akan terus

meningkat. Akibat nilai ekonomis tanah yang semakin meningkat, menyebabkan timbulnya masalah pertanahan yang semakin kompleks.

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, memerintahkan diselenggarakannya pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum. Pendaftaran tanah tersebut kemudian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sedangkan ketentuan pelaksanaannya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997. Salah satu kegiatan pendaftaran tanah adalah pengukuran dan pemetaan, yang bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum mengenai letak, batas dan luas bidang tanah.

Dalam menyelenggarakan pendaftaran tanah, di Indonesia dikenal ada dua asas pokok yang harus dipenuhi yaitu asas publisitas dan asas spesialisitas. Asas publisitas merupakan pengumuman mengenai orang-orang yang menjadi haknya dan macam hak atas tanahnya, sedang asas spesialisitas merupakan kepastian letak, luas dan batas suatu bidang tanah. Apabila kedua asas tersebut dipenuhi, maka kepastian hukum dari subyek dan obyek hak atas tanahnya dapat terjamin.

Untuk mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan memerlukan dukungan sumber daya manusia yang berkualitas, tenaga ahli yang cakap, terampil, profesional, disiplin dan berdedikasi tinggi serta akhlak yang

tidak tercela. Dengan demikian peran petugas ukur sebagai sumber daya pelaksana dalam proses kegiatan pendaftaran tanah sangatlah berarti atau dapat dikatakan bahwa petugas ukur merupakan ujung tombak bagi keberhasilan kegiatan pendaftaran tanah, disamping dukungan pembukuan riwayat tanah yang lengkap dan terpercaya yang mempunyai tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum hak atas tanah.

Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi seperti kantor pertanahan pada umumnya, dimana kegiatan pendaftaran tanah merupakan salah satu tugas Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, yang di dalamnya ada kegiatan pengukuran dan pemetaan. Kegiatan pengukuran dan pemetaan ini merupakan tugas dari Sub Seksi Pengukuran, Pemetaan dan Konversi yang mempunyai 27 (dua puluh tujuh) orang staf pegawai, terdiri dari satu orang staf bagian administrasi dan 26 (dua puluh enam) staf bagian teknis (petugas ukur) yang telah mendapat pelatihan kursus juru ukur, pengatur ukur dan lulusan Diploma IV Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta.

Dengan melihat dari tingkat pendidikan, pelatihan yang pernah diikuti, pengalaman kerja dan volume pekerjaan pengukuran, tentunya produktivitas suatu kantor pertanahan tidak sama satu dengan yang lainnya.

Untuk mengetahui produktivitas suatu kantor pertanahan khususnya di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi, perlu dilakukan penelitian tentang produktivitas dari petugas ukurnya. Karena produktivitas petugas ukur baik

langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi produktivitas dari suatu kantor pertanahan. Untuk itu penelitian ini mengambil judul :
“PRODUKTIVITAS PETUGAS UKUR DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, perumusan masalah yang dapat dikemukakan oleh penyusun sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat produktivitas petugas ukur di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur ?
2. Apakah latar belakang pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja yang ada pada petugas ukur dapat menunjang produktivitas petugas ukur ?
3. Di antara latar belakang pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja, aspek mana yang paling menunjang produktivitas petugas ukur ?

C. Pembatasan Masalah

Mengingat keterbatasan waktu, dana, pengetahuan dan kemampuan penyusun, maka penyusun membatasi masalah ini dengan memfokuskan sasaran penelitian dengan menganalisa :

1. Produktivitas petugas ukur yang dimaksudkan adalah dilihat dari hasil/produk dari petugas ukur berupa gambar ukur selama lima tahun terakhir (1996 - 2000).
2. Gambar ukur yang diteliti merupakan hasil dari kegiatan pendaftaran tanah secara sporadik (kegiatan rutin).
3. Dalam penelitian ini kualitas dari petugas ukur ditentukan dari gambar ukur yang dihasilkan/diselesaikan pada tahun 2000 dan dianggap sebagai populasi.
4. Aspek yang digunakan untuk melihat produktivitas petugas ukur dalam penelitian ini adalah tingkat pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja.
5. Adapun faktor-faktor lain yang mempengaruhi pengukuran di lapangan (transportasi, jarak, keadaan medan dan kebijakan pemberi tugas) selain faktor-faktor di atas dalam penelitian ini diabaikan.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui tingkat produktivitas petugas ukur di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur.
- b. Untuk mengetahui latar belakang pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja petugas ukur dalam menunjang produktivitas petugas ukur.

- c. Untuk mengetahui latar belakang yang paling menunjang produktivitas petugas ukur.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai kegunaan antara lain :

- a. Bahan masukan untuk mengambil langkah-langkah kebijakan dalam usaha meningkatkan produktivitas petugas ukur di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur.
- b. Bahan masukan untuk menetapkan tolok ukur kualitas petugas ukur sebagai usaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian, hasil analisa dan pembahasan pada BAB V dapat disimpulkan bahwa :

1. Tingkat Produktivitas petugas ukur di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur cukup produktif. Selama lima tahun terakhir (1996–2000) perkembangan indeks produktivitasnya turun sebesar -1 %.
2. Secara kuantitas, besarnya produktivitas petugas ukur di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur ditunjang oleh pendidikan, pelatihan dan pengalaman yaitu sebesar 45,8 %. Sedangkan secara kualitas dari 753 gambar ukur yang dijadikan sampel, sebanyak 745 atau 96,68 % gambar ukur sudah dapat memberikan jaminan letak, luas dan batas bidang tanah yang telah diukur.
3. Secara kuantitas, pelatihan atau kursus paling menunjang terhadap besarnya produktivitas petugas ukur di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, sedangkan secara kualitas sangat ditunjang oleh tingkat pendidikan yang tinggi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung produktivitas petugas ukur di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur.
2. Memperbaiki sistem pembagian berkas secara proporsional sesuai dengan permohonan yang masuk dan kemampuan petugas ukur dalam menyelesaikan gambar ukur.
3. Meningkatkan pengawasan petugas ukur terhadap pekerjaan dan kedisiplinan agar produktivitas terus meningkat sehingga tunggakan yang ada dapat terselesaikan.
4. Perlu diadakan penelitian lebih lanjut mengenai adanya faktor-faktor lain yang menunjang terhadap produktivitas petugas ukur di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi (1998), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi, Jakarta, Rineka Cipta.
- Algifari (2000), *Analisis Regresi, Teori Kasus dan Solusi*, Edisi 2, Yogyakarta, BPFE.
- Nazir, Moh. (1985), *Metode Penelitian*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Perangin, Effendi (1989), *Hukum Agraria di Indonesia Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Jakarta, Rajawali.
- Suweken, Putu (1996), *Statistika Terapan*, Yogyakarta, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (1996), *Pedoman Penulisan Skripsi*, Yogyakarta.
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi (1989), *Metode Penelitian Survey*, Jakarta, LP3ES.
- Sudjana (1996), *Pengantar Statistika*, Bandung, Tarsito.
- Sumanto (1995), *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan, Aplikasi Metode Kuantitatif dan Statistika Dalam Penelitian*, Yogyakarta, Andi Offset.
- Surakhmad, Winarno (1990), *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode dan Teknik*, Edisi ketujuh, Bandung, Tarsito.
- Sutrisno Hadi (1992), *Analisis Regresi*, Yogyakarta, Andi Offset.
- Sukardi (1998), "*Studi Produktivitas Kerja Pegawai Kantor Pertanahan Kotamadya Probolinggo*", Skripsi Diploma IV, Yogyakarta, STPN.
- Triono, Bambang (1982), *Pengetahuan Alat Ukur*, Jakarta, Direktorat Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria.